

Dampak Perhutanan Sosial Terhadap Pendapatan Masyarakat

1Y. Sri Susilo, 2Nairobi

Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, ISEI Cabang Yogyakarta, yssusilo@gmail.com
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, ISEI Cabang Lampung, nairobi.saibi@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the impact of social forestry implementation on community income. Research location in Tanggamus Regency (Lampung) and Kulon Progo Regency and Gunungkidul Regency (Daerah Istimewa Yogyakarta). Primary data used primary data. Primary data were collected from field surveys (questionnaires and in-depth interviews). Primary data collection is also done with focused group discussion (FGD) and discussion with the expert (expert meeting). The analysis method uses descriptive analysis and multiple regression analysis.

The results of the study show that the impact of social forestry has increased production and income of the community (farmers of respondents). Multiple regression analysis proves that the length of SK IUPHKm, land area, number of labor, and partnership have positive effect to income. The types of partnerships that have been done in the form of counseling, training, buying products, providing capital assistance, and mentoring. The constraints faced by Hkm group farmers are a combination of limited access to raw materials, access to capital, market access, and traditional equipment.

Keywords: social forestry, community forest, community income.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak pelaksanaan perhutanan sosial terhadap pendapatan masyarakat. Lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Tanggamus (Lampung) serta Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta). Data pokok yang digunakan data primer. Data primer dikumpulkan dari survei lapangan (kuesioner dan wawancara mendalam). Pengumpulan data primer juga dilakukan dengan focused group discussion (FGD) dan diskusi dengan pakar (expert meeting). Metode analisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi berganda.

Hasil kajian menunjukkan dampak perhutanan sosial telah terjadi peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat (petani responden). Analisis regresi berganda membuktikan bahwa lama SK IUPHKm, luas lahan, jumlah tenaga kerja, dan kemitraan berpengaruh positif terhadap pendapatan. Jenis kemitraan yang telah dilakukan berupa penyuluhan, pelatihan, membeli produk, memberi bantuan modal, dan pendampingan. Kendala yang dihadapi oleh petani kelompok Hkm adalah kombinasi dari terbatasnya akses bahan baku, akses modal, akses pasar, dan masih tradisionalnya peralatan yang dimiliki.

Kata kunci: perhutanan sosial, hutan kemasyarakatan, pendapatan masyarakat

1. PENDAHULUAN

Hutan untuk rakyat merupakan paradigma baru perhutanan sosial (Kuncoro, 2018). Intinya hutan bukan hanya untuk pengusaha atau usaha besar tapi rakyat kecil dan usaha kecil mikro (UKM) di seputar hutan perlu mendapat jaminan izin/hak untuk menanam kopi, jagung dan lain-lain, maupun air minum dan penghidupan yang layak. Di masa lalu perambah hutan, masyarakat adat dan rakyat yang tinggal di seputar hutan sering dikejar-kejar oleh polisi hutan karena mencuri kayu, merusak, bahkan membakar hutan. Kini mereka malah diberi izin/hak pengelolaan hutan.

Peraturan Menteri (Permen) LHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10 tahun 2016

mengatur dan menjelaskan apa dan bagaimana perhutanan sosial (Lestari, 2017). Tujuannya jelas: pertama, pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan hutan di bidang perhutanan sosial. Kedua, untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat, yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan. Singkatnya, Permen ini bermuara pada rakyat sejahtera namun hutan harus juga lestari.

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama

meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (Kuncoro, 2018). Ruang lingkup perhutanan sosial mencakup 5 jenis hutan, yaitu: (1) hutan desa, (2) hutan kemasyarakatan, (3) hutan tanaman rakyat, (4) kemitraan kehutanan, dan (5) hutan adat.

Sampai dengan akhir pemerintahan SBY (Oktober 2014), rakyat yang memperoleh izin/hak atas kelima jenis hutan ini hanya 449,1 ribu ha atau hanya sekitar 4% dari total izin/hak yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hingga Desember 2017, di bawah Kabinet Kerja Jokowi, kini sudah 4.150 unit SK izin/hak diberikan kepada 293.367 kepala keluarga dengan luasan hutan mencapai 1,336 juta ha.

Tentu spillover dan multiplier effects dari perhutanan sosial akan berdampak langsung bagi masyarakat yang mendapat izin/hak yang selama ini hanya diberikan dan dinikmati kepada pengusaha kelas kakap. Dampak tidak langsung juga akan dirasakan bagi daerah di seputar hutan akan mendapat manfaat dari penciptaan kerja (menurunkan pengangguran), meningkatnya nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi, serta menurunkan ketimpangan.

Perhutanan sosial sejatinya sudah dirintis sejak lama melalui berbagai bentuk kegiatan, baik berupa program tumpangsari di Perhutani, maupun PMDH oleh HPH/HTI. Pasca Orde Baru, pemerintah pusat semakin membuka ruang untuk hak yang lebih besar bagi masyarakat lokal melalui Undang-Undang tentang Kehutanan no. 41 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 2007 jo no. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) no. 35 tahun 2012, Wilayah Adat diakui dan bukan menjadi bagian dari Kawasan Hutan Negara.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no. 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial sebagai revisi atas peraturan-peraturan program perhutanan sosial sebelumnya. Dalam Permen LHK ini dijelaskan secara rinci mengenai skema perhutanan sosial, mulai dari penyederhanaan mekanisme proses usulan sampai dengan terbitnya izin.

Dengan melalui terbitnya peraturan perhutanan sosial dan adanya beberapa perubahan kebijakan diharapkan dapat merealisasikan target RPJMN tahun 2015-2019 di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo terkait Pemberian Akses Kelola Kawasan Hutan oleh masyarakat seluas 12,7 juta ha. Mengingat program perhutanan sosial ini mempunyai kontribusi terhadap perekonomian

nasional melalui pengurangan kemiskinan pada tingkat rumah tangga kelompok tani pengelola perhutanan sosial.

Kajian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis seberapa jauh dampak perhutanan sosial terhadap pedapatan masyarakat atau petani pemegang Ijin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm). Artikel ini terdiri dari 4 (empat) bagian. Setelah bagian pendahuluan dilanjutkan dengan bagian metode penelitian. Bagian ketiga merupakan pembahasan dari hasil kajian. Bagian terakhir merupakan simpulan dari hasil riset.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi Penelitian

Identifikasi dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari perhutanan sosial dilakukan di dua lokasi penelitian, yaitu: di Provinsi Lampung dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dua lokasi penelitian ini dipilih karena sudah ditetapkan sebagai provinsi percontohan perhutanan sosial di Indonesia. Masing-masing provinsi diambil dua lokasi HKm.

Lokasi penelitian untuk Provinsi Lampung dilakukan di Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo dan Pekon Sukamaju Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus. Sedangkan untuk Provinsi DIY dilakukan di Dusun Kalibiru, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo dan di Dusun Menggoran II, Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. Lokasi penelitian di wilayah DIY dan Lampung memiliki HKm seluas masing-masing 0,41% dan 36,3% terhadap total luasan HKm di Indonesia.

2.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam riset mencakup data primer dan data sekunder. Definisi data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli (Kuncoro, 2013). Data primer diperoleh dari survei lapangan dan wawancara terhadap petani responden yang memperoleh ijin IUHP. Di samping itu juga dilakukan wawancara mendalam dengan responden terpilih (selected indepth interview). Pengumpulan data primer juga dilakukan melalui Focused Group Discussion (FGD) dan Expert Meeting (EM). Dalam EM hasil temuan dari riset akan dibahas oleh pakar dan pengambil kebijakan yang kompeten untuk mendapat masukan. Kemudian secara singkat dapat dikatakan bahwa data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain (Kuncoro, 2013). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari berbagai sumber sekunder (lembaga terkait) dan sumber data yang lain dari akses jaringan internet (artikel jurnal, laporan, dan sebagainya).

2.3 Teknik Pengambilan Sampel

Unit analisis dalam penelitian ini adalah anggota Kelompok HKm. Teknik pengambilan

sample dilakukan dengan metode cluster sampling dan purposive sampling. Cluster sampling disebut juga area sampling. Cluster sampling digunakan ketika elemen dari populasi secara geografis tersebar luas sehingga sulit disusun sampling frame (Kuncoro, 2013). Keuntungan penggunaan teknik ini adalah menjadikan proses sampling lebih murah dan cepat daripada jika digunakan teknik random sampling. Teknik penentuan responden menggunakan purposive sampling (sampel bertujuan).

Teknik ini merupakan pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang disyaratkan misalnya terkait sifat, karakteristik, kriteria, dan sebagainya. Responden dalam penelitian adalah anggota kelompok tani HKm. Jumlah responden untuk masing-masing lokasi HKm adalah 50 orang. Untuk mempertajam analisis, peneliti juga melakukan wawancara ke informan lain yaitu pengurus kelompok tani, kelompok sadar wisata (pokdarwis), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), anggota kelompok tani, unit usaha dari kelompok HKm serta stakeholder terkait baik dari pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

2.4 Metode Analisis

2.4.1 Deskriptif

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Analisis deskriptif memberikan gambaran pola-pola yang konsisten dalam data, sehingga hasilnya dapat dipelajari dan ditafsirkan secara singkat dan penuh makna (Kuncoro, 2013). Dalam analisis deskriptif, dilakukan interpretasi atas data dan hubungan yang ada dalam penelitian tersebut. Di samping itu juga dilakukan komparasi antara hasil penelitian dengan hasil-hasil penelitian terkait dan dilakukan korelasi antara hasil-hasil penelitian tersebut dengan teori atau konsep yang relevan (Singarimbun dan Effendi, 1989). Selanjutnya analisis secara deskriptif dapat juga dilakukan dengan teknik statistik yang relatif sederhana, seperti misalnya menggunakan tabel, grafik, dan ukuran tendensi sentral yaitu nilai rata-rata, nilai tengah, dan modus (Kountur, 2003). Dengan mengacu pada pengertian analisis deskriptif tersebut maka sekalipun metode analisis yang digunakan dalam riset ini relatif sederhana, namun dapat memberikan informasi yang memadai sesuai dengan tujuan penelitian.

2.4.2 Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen ($X_1, X_2, \dots, X_n$) dengan variabel dependen (Y) (Widarjono, 2010). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan

positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan untuk regresi adalah data berskala interval atau rasio.

Dalam analisis regresi berganda, hasil estimasi model dilakukan sejumlah terhadap pengujian ekonometrika yang mencakup (Widarjono, 2010):

- 1) Uji pelanggaran terhadap asumsi klasik, yang terdiri uji Multikolinearitas, uji Heteroskedastisitas, dan uji Otokorelasi
- 2) Goodness of fit dan uji statistik, dalam hal ini goodness of fit dilihat dari koefisien determinasi (nilai R^2 atau adjusted- R^2) sedangkan uji statistik terdiri dari uji F dan uji t.

III. PEMBAHASAN

Analisis dampak pendapatan dari perhutanan sosial yang berlokasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Provinsi Lampung. Pembahasan dampak ekonomi meliputi: (1) peningkatan produksi setelah menerima Surat Keputusan (SK) Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm), (2) peningkatan pendapatan sebelum dan setelah memiliki surat keputusan, dan (3) faktor-faktor penentu pendapatan anggota HKm.

3.1 Dampak Terhadap Produksi

Pemberian HKm kepada petani, artinya memberikan kepastian hak pengelolaan hutan bagi petani, terutama dalam hak pengelolaan luasan lahan yang selama ini telah mereka garap (persil). Kepastian hak pengelolaan ini secara ekonomi memberikan nilai tambah bagi aset mereka terutama aset tanah dan aset batang pohon perkebunan. Adanya kepastian kepemilikan aset ini diharapkan dapat meningkatkan semangat berproduksi tanpa merasa khawatir bahwa apa yang petani lakukan melanggar hukum.

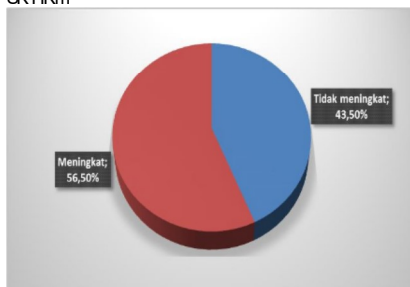
Gambar 3.1 memperlihatkan bahwa adanya HKm ternyata berdampak terhadap peningkatan produksi. Sebanyak 56,5 persen responden menyatakan bahwa produksi tanaman mereka semakin meningkat setelah mereka menerima Ijin Usaha Pengelolaan HKm (IUPHKm). Peningkatan ini terjadi dikarenakan mereka lebih bersemangat untuk menggarap ladang HKm mereka. Dengan kata lain, yang dahulu kebun dan ladang merupakan sumber pendapatan sampingan dengan adanya HKm kebun dan ladang mereka menjadi sumber pendapatan utama.

Sebagian besar petani yang mengalami peningkatan produksi adalah petani di HKm Kabupaten Tanggamus. Seluruh responden petani di HKm Tanggamus adalah petani kopi yang juga memiliki tanaman sampingan lain seperti lada,

pisang, cengkeh, serta tanaman sayuran. Tanaman tersebut memiliki masa panen baik tahunan, triwulanan, bulanan ataupun harian. Dengan demikian, petani dapat menghitung dan memperkirakan jumlah produksi yang mereka hasilkan pada setiap waktu panen.

Berbeda halnya dengan petani di HKm di wilayah DIY, khususnya kelompok petani HKm Tani Manunggal di Dusun Menggoran II, Desa Bleberan, Playen, Gunungkidul dan kelompok tani HKm Mandiri Dusun Kalibiru, Desa Hargowilis, Kokap, Kulon Progo. Kelompok HKm Tani Manunggal memiliki tanaman utama berupa pohon Jati (hutan lindung) yang tidak dapat dipanen secara tahunan (Desa Wisata Bleberan, 2015a; 2015b). Akibatnya, nilai produksi dari hasil hutan belum diketahui walaupun secara langsung dapat dilihat semakin membesarnya batang pohon jati. Demikian pula kelompok Tani HKm Mandiri yang kawasan hutan yang dikelolanya merupakan hutan lindung, yang sebagian besar terdiri dari tanaman jati, akasia, sonokeling, dan mahoni. Jumlah tanaman yang paling banyak adalah pohon jati (Desa Wisata Kalibiru, 2017). Di kedua wilayah tersebut dapat dikatakan tidak menikmati peningkatan produksi karena termasuk kawasan hutan lindung.

Gambar 3.1 Peningkatan Produksi Setelah Mendapat SK HKm



Sumber: Diolah dari data primer

3.2 Dampak Terhadap Pendapatan

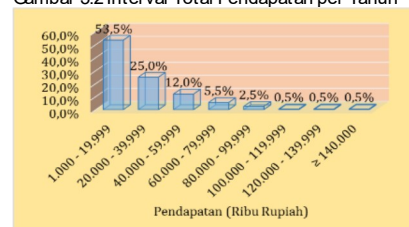
Peningkatan dalam produksi petani akan berdampak terhadap pendapatan yang diterima. Tentu saja ini tergantung kepada fluktuasi harga komoditas yang diproduksi dan dijual ke pasar. Peningkatan produksi petani HKm ternyata memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan pendapatan petani.

Berdasarkan Gambar 3.2 dapat dilihat bahwa pendapatan yang diperoleh petani dari hasil produksinya tersebut sangat bervariasi. Pendapatan

petani sebagian besar berada pada interval Rp1-20 juta per tahun yaitu sebesar 53,5 persen, kemudian 25 persen berada pada interval pendapatan Rp20-40 juta per tahun, serta 5,5 persen berada pada interval pendapatan Rp 60-70 juta. Sedangkan pendapatan yang antara Rp80 juta sampai dengan Rp140 juta per tahun hanya sebanyak 4 persen saja. Secara rata-rata pendapatan petani HKm adalah sebesar Rp28,3 juta selama satu tahun atau Rp 2,36 juta per bulan.

Berdasarkan data BPS Tanggamus, pengeluaran penduduk per kapita di Kabupaten Tanggamus per bulan adalah sebesar Rp0,714 juta, atau Rp8,572 juta per tahun (BPS Tanggamus, 2017). Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa jika rata-rata petani memiliki 4 orang anggota keluarga, maka rata-rata pengeluaran per kapita per tahun adalah sebesar Rp34,288 juta. Artinya sebagian besar pendapatan petani di HKm sebagian besar belum cukup untuk memenuhi pengeluaran kebutuhan rumah tangga selama satu tahun.

Gambar 3.2 Interval Total Pendapatan per Tahun



Keterangan: (*) Rata-rata Total Pendapatan Rp28.340.724,00

Sumber: Diolah dari data primer

Berdasarkan Tabel 3.1 terlihat bahwa terdapat perbedaan pendapatan antara pemilik HKm di Kabupaten Tanggamus (HKm Sinar Mulya dan HKm Beringin Jaya) dan HKm di wilayah DIY (HKm Mandiri dan HKm Tani Manunggal). Petani di Kabupaten Tanggamus relatif mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Petani di wilayah DIY (HKm Tani Manunggal, Kabupaten Gunung Kidul dan HKm Mandiri, Kabupaten Kulon Progo).

Dari 54 persen petani yang memiliki pendapatan di interval Rp1-19,9 juta, ternyata 47 persen adalah petani di HKm di wilayah DIY, sedangkan sisanya 7 persen berada di wilayah HKm di Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya untuk 25 persen petani yang memiliki pendapatan dengan lebih interval Rp20-39,9 juta hanya 2,5 persen yang berasal dari petani HKm Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul (DIY), sedangkan 22 persen berasal dari petani HKm Kabupaten Tanggamus.

Untuk pendapatan dengan interval yang lebih tinggi, atau petani yang berpendapatan Rp40 juta sampai dengan Rp140 juta, hanya 0,5 persen saja yang berasal dari HKm di wilayah DIY, dan 21,5 persen adalah petani dari HKm Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan Tabel 6.1 menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh petani di HKm di wilayah DIY lebih rendah dibandingkan petani HKm di Kabupaten Tanggamus.

Tabel 3.1 Crosstabulation antara Total Pendapatan dan Alamat HKm

Kelas	Interval Pendapatan (Ribu rupiah)	HKm				Total
		Mandiri (%)	Tani Manunggal (%)	Snar Mulya (%)	Beringin Jaya (%)	
1	1000 - 19.999	24,5	22,5	3	4	54,0
2	20.000 - 39.999	0,5	2	5	17	24,5
3	40.000 - 59.999	0	0,5	8	3,5	12,0
4	60.000 - 79.999	0	0	5	0,5	5,5
5	80.000 - 99.999	0	0	2,5	0	2,5
6	100.000 - 119.999	0	0	0,5	0	0,5
7	120.000 - 139.999	0	0	0,5	0	0,5
8	≥ 140.000	0	0	0,5	0	0,5
	Total	25	25	25	25	100,0

Sumber: Diolah dari data primer

Sumber pendapatan petani responden (anggota kelompok HKm) berasal dari 3 sumber pendapatan dari usaha tani, yaitu yang berasal dari tanaman utama, tanaman sampingan, dan budidaya ternak. Tabel 3,2 menggambarkan interval proporsi pendapatan responden yang berasal dari tanaman utama, tanaman sampingan dan juga ternak terhadap total pendapatannya.

Untuk proporsi tanaman utama, rata-rata proporsi pendapatan dari tanaman utama sebesar 0,473 persen. Terdapat 52 persen petani yang memiliki proporsi dari pendapatan utamanya yang berada lebih dari 50 persen. Sebanyak 48 persen petani memiliki proporsi di bawah 50 persen pendapatannya bersumber dari tanaman utama. Untuk tanaman sampingan rata-rata proporsi pendapatannya adalah 0,36,4 persen. Proporsi pendapatan dari tanaman utama cenderung lebih kecil, terdapat 67 persen petani yang memiliki proporsi pendapatan yang sangat kecil atau dibawah 50 persen.

Selanjutnya terdapat 33 persen petani yang penghasilan utama dari tanaman sampingan cukup besar atau proporsinya lebih dari 50 persen (lihat Tabel 3.2). Demikian pula untuk proporsi pendapatan petani yang berasal dari usaha ternak, rata-rata proporsinya 36,4 persen. Proporsi pendapatan petani dari ternak cenderung lebih kecil, terdapat 87 persen petani yang memiliki proporsi hanya di bawah bawah 50 persen, dan hanya sebagian kecil atau 13 persen memiliki proporsi yang melebihi 50 persen.

Tabel 3.2 Interval Proporsi Pendapatan Responden dari Tanaman Utama, Tanaman Sampingan, dan Ternak Terhadap Total Pendapatan Responden

Kelas	Interval Proporsi Pendapatan	Utama		Sampingan		Ternak	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	0,0 – 9,99	79	39,5	79	39,5	138	69,0
2	10,0 – 19,9	4	2,0	29	14,5	13	6,5
3	20,0 – 19,9	4	2,0	9	4,5	11	5,5
4	30,0 – 39,9	5	2,5	11	5,5	9	4,5
5	40,0 – 40,9	4	2,0	6	3,0	3	1,5
6	50,0 – 59,9	4	2,0	5	2,5	3	1,5
7	60,0 – 69,0	9	4,5	11	5,5	5	2,5
8	70,0 – 79,0	16	8,0	9	4,5	1	0,5
9	80,0 – 89,0	33	16,5	5	2,5	7	3,5
10	90,0 – 100	42	21,0	36	18,0	10	5
		200	100,0	200		200	

Keterangan:

1) Rata-rata Proporsi Pendapatan Tanaman Utama : 47,3 persen

2) Rata-rata Proporsi Pendapatan Tanaman Sampingan : 36,4 persen

3) Rata-rata Proporsi Pendapatan Ternak : 36, 4 persen

Sumber: Diolah dari data primer

Keragaman dalam proporsi pendapatan ini sangat dipengaruhi oleh jenis tanaman utama yang dihasilkan oleh petani, di HKm Kabupaten Tanggamus, tanaman utama yang ditanam sebagian besar adalah pohon kopi sehingga dampaknya mereka lebih mengandalkan tanaman utama sebagai sumber pendapatannya. Sebaliknya petani HKm di wilayah DIY berbeda, tidak dapat mengandalkan pohon jati dan pohon lainnya di hutan sebagai sumber pendapatan utama dikarenakan hutan yang mereka kelola termasuk kawasan hutan lindung. Petani HKm di wilayah DIY mengandalkan tanaman sampingan, ternak, dan pengelolaan kawasan hutan untuk wisata sebagai sumber pendapatan mereka.

Kelompok HKm Mandiri terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Kalibiru, Hargowilis, Kokap, Kulon Progo. Berdasarkan wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD) diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan desa wisata tersebut berdampak positif terhadap perekonomian, khususnya pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Dari kegiatan wisata tersebut pendapatan pengelola desa wisata diperoleh dari tiket masuk ke lokasi wisata, sewa penginapan (homestay dan pondok wisata), gardu pandang, paket wisata (joglo pertemuan, outbond, flying fox, jalur tracking, dan gardu foto) (Desa Wisata Kalibiru, 2017). Masyarakat, khususnya anggota kelompok HKm Mandiri yang terlibat dalam kegiatan desa wisata pendapatannya juga meningkat, misalnya yang terlibat sebagai tenaga kerja pengelola kawasan desa wisata dan pengelola warung makanan.

Seluruh pengelola warung makanan di desa wisata Kalibiru menerapkan harga yang sama. Dari jumlah warung sebanyak 38 unit, 20 unit berada di dalam kawasan wisata dan 18 unit berada di luar kawasan wisata. Harga diatur oleh pengelola desa wisata. Margin keuntungan rata-rata sekitar 10 persen. Pendapatan kotor untuk hari biasa sekitar Rp10.000,00 per hari, sedangkan pada hari libur atau hari minggu dapat mencapai Rp800.000,00 per hari.

Di kawasan desa wisata Kalibiru terdapat 6 penginapan yang disewakan dengan tarif Rp300.000,00 per hari. Penginapan tersebut dikelola oleh kelompok masyarakat yang mengelola kawasan wisata tersebut. Dengan demikian ketentuan tarif dan standar pelayanan sudah ditentukan oleh pengelola. Mulai bulan April 2018, tiket masuk kawasan desa wisata Kalibiru untuk wisatawan lokal Rp10.000,00 per orang sedangkan untuk wisatawan mancanegara sebesar Rp20.000,00 per orang.

Efek pengganda dari kegiatan desa Wisata Kalibiru tidak hanya diperoleh anggota kelompok HKM Mandiri, Kalibiru dan masyarakat Desa Hargowilis, namun juga diterima warga di sekitarnya. Masyarakat desa tetangga menjalankan usaha sewa angkutan jeep dengan rute Waduk Sermo– Kalibiru PP, Qereng–Kalibiru PP, dan Grinyono–Kalibiru PP. Sewa angkutan rata-rata sebesar Rp350 ribu PP. Untuk hari biasa, bukan hari libur dan minggu, biasanya transaksi sewa jeep sebanyak 1 kali per hari. Pada hari libur atau hari Minggu, transaksi sewa jeep yang terjadi mencapai 2-3 kali per hari.

Jumlah wisatawan yang datang ke kawasan desa wisata Kalibiru dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 selalu meningkat (lihat Tabel 3.3). Selanjutnya pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 87.572 pengunjung (19,76 persen). Penurunan tersebut terkait di wilayah juga sudah mulai dikembangkan kawasan wisata sejenis di sekitar Kalibiru. Dugaan lain, pada umumnya wisatawan/pengunjung hanya datang sekali dan jarang yang datang untuk ke-2 atau ke-3 kali (kunjungan berulang).

Tabel 3.3 Jumlah Wisatawan/Pengunjung Desa Wisata Kalibiru

Tahun	Jumlah Wisatawan / Pengunjung
2010	7.167
2011	13.033
2012	19.012
2013	19.762
2014	79.137
2015	309.541
2016	443.070
2017	355.498
Jumlah	1.246.220

Sumber: Diolah dari data primer

Selanjutnya untuk anggota kelompok HKM Tani Manunggal, Dusun Menggoran II, Desa Bleberan, Playen, Gunungkidul memperoleh pendapatan dari tanaman sampingan dan hasil ternak. Di samping itu, sebagian anggota HKM Tani Manunggal terlibat dalam kegiatan desa wisata Bleberan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Sejahtera”. Terdapat 3 jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes yaitu unit pengelolaan desa wisata (Goa Rancang Kencana dan Air Terjun Sri Gethuk), unit pemanfaatan dan pengelolaan sumber mata air, dan unit usaha simpan pinjam (Desa Wisata Bleberan, 2015a).

Kegiatan usaha yang terkait dengan pengelolaan desa wisata Bleberan antara lain sewa penginapan (homestay), baik untuk keluarga dan rombongan, warung makanan dan sebagainya. Pengelola desa wisata menerapkan paket wisata, dalam paket tersebut mencakup masuk obyek wisata, penginapan, makan-minum tradisional, nonton atraksi seni budaya, belajar musik gamelan dan sebagainya (Desa Wisata Bleberan, 2015b).

Tarif paket wisata sebesar Rp390.000,00 per paket minimal 20 paket. Di samping itu, pengelola juga wisata menawarkan paket outbond (Rp50.000,00 per orang) dan paket rafting (Rp50.000,00 per orang). Setia pengunjung juga ditarik retribusi Rp10.000,00 per orang. Berdasarkan data 3 tahun terakhir, jumlah wisatawan dapat mencapai 2.000 orang setiap minggu. Anggota kelompok HKM Tani Manunggal yang terlibat dalam kegiatan desa wisata tentu akan memperoleh tambahan pendapatan.

3.3 Faktor-Faktor Penentu Pendapatan

Subbab ini akan berupaya menjawab pertanyaan: apakah faktor-faktor penentu pendapatan dari responden yang merupakan anggota HKM Sinar Mulya dan HKM Beringin Jaya (Kabupaten Tanggamus) serta HKM Tani Manunggal (Kabupaten Gunungkidul) dan HKM Mandiri (Kabupaten Kulon Progo)? Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dicermati pada Tabel 4.

Tabel 4 Hasil Regresi Faktor-faktor Penentu Pendapatan Responden***

Variabel Independen	Model 1	Model 2
Konstanta	2,516E7 (2,540)*	1,845E7 (3,330)*
Lama SK diterima	-1,722E6 (-4,325)*	-1,701E6 (-4,647)*
Luas dalam hektar	4,302E6 (3,610)*	4,240E6 (3,758)*